

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOMPLEKS PERKANTORAN-BUMI TI'I LANGGA PERMAI
BA'A – 2025**

KATA PENGANTAR

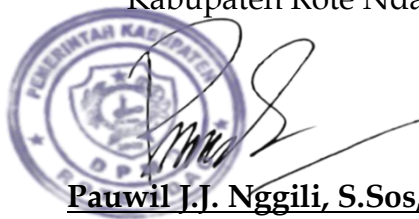
Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Karunianya, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai media Pertanggungjawaban kinerja, yang menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu kami menyambut baik semua masukan berupa saran dan kritik yang Konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dokumen ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermfaat dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat rote ndao.

Ba'a, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Rote Ndao



Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Hukum.....	3
1.2 Struktur Organisasi.....	5
1.3 Data Pegawai.....	6
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAN BELANJA DAERAH.....	11
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	15
BAB V PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Dasar Hukum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

1.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”*.

Perwujudan **Visi** tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) **Misi** yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.

Berpedoman pada Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Dinas

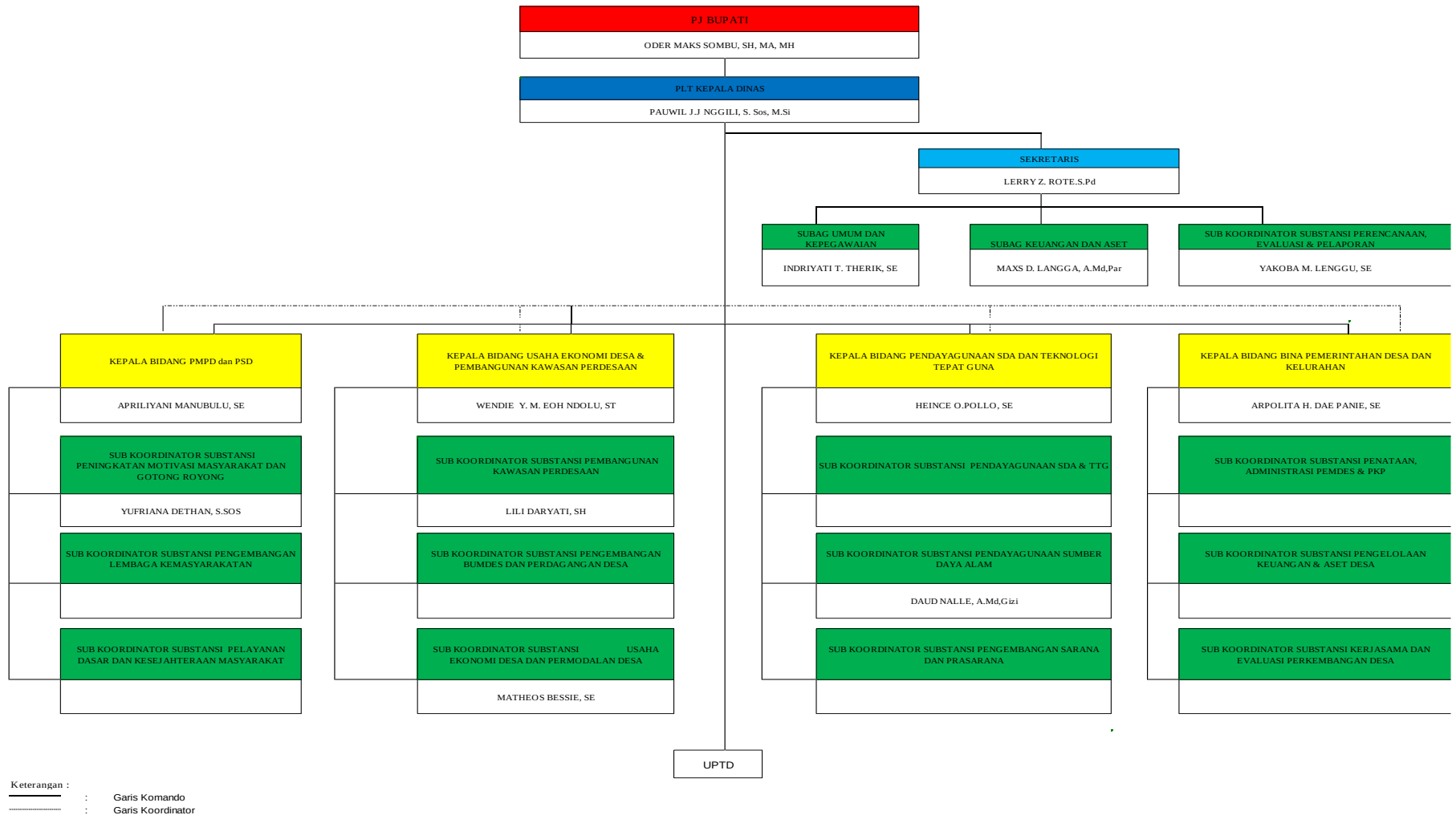
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao menjalankan Misi ke-

4 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

1.2 Struktur Organisasi Perangkat daerah

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Rote Ndao



1.3. Dapat diuraikan Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan sebagai berikut:

1.3.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan

Kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari 18 (Dua Pulu Satu) orang laki-laki dan 8 (Delapan) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk I	1	-	1
2	IV/a	Pembina	1	-	1
<i>Jumlah Golongan IV</i>			2	-	2
3	III/d	Penata Tk.I	1	5	5
4	III/c	Penata	3	1	4
5	III/b	Penata Muda Tk.I	4	1	5
6	III/a	Penata Muda	6	1	7
<i>Jumlah Golongan III</i>			14	8	20
7	II/c	Pengatur Tk.I	2	-	2
<i>Jumlah Golongan II</i>			2	-	2
TOTAL			18	8	26

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 14 (Empat Belas) orang dan golongan II sebanyak 2 (Dua) orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	10	8	18
2	D3	3	-	3
3	SLTA/SMK	5	-	5
Total		18	8	26

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebanyak 25 (Dua puluh lima) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 18 (delapan belas) orang, D3 berjumlah 3 (tiga) orang dan SMA berjumlah 5 (lima) orang.

1.3.4 Daftar Nominatif Pegawai

Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1.	Yames M. K. Therik, SH NIP. 198004291999031001	Pembina Tk.I / IV b		S1
2.	Leri A. Z. Rotte, SH NIP. 197104192006041002	Pembina/ IV a	Sekretaris	S1
3.	Heince O. Pollo, SH NIP. 19731024 200604 1 009	Pembina/ IV a	Kepala Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG	S1
4.	Apriliyani Manubulu, SE NIP. 19770424 200604 2 035	Pembina/ IV a	Kepala Bidang PM dan PSD	S1
5.	Arpolita H. Dae Panie, SE NIP. 198306082010012023	Penata Tk. I / III d	Kabid Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan	S1
6.	Wendi Y.M.Eoh Ndolu, ST NIP.197603192011012002	Penata Tk. I / III d	Kabid UED & Pembangunan kawasan Perdesaan	S1
7.	Indriyati T. Therik, SE NIP.197208111992032010	Penata Tk. I /III d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1

8.	Yakoba Marlein Lenggu, SE NIP. 198303272010012029	Penata Tk. I /III d	Kapala Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	S1
9.	Maxs D. Langga, A.Md.Par NIP. 197609182006041005	Penata / III c	Kasubag Keuangan dan Aset	D3
10.	Lili Daryati, SH NIP. 198507092007012002	Penata / III d	Sub Koordinator Substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan	S1
11.	Yufriana Dethan, S.Sos NIP. 197507172012122003	Penata / III c	Sub Koordinator Substansi Peningkatan Motivasi Masy & Gotong Royong	S1
12.	Daud Nalle,A.Md.Gz NIP. 198510132010011019	Penata / III c	Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam	D3
13.	Matheos Bessie, SE NIP. 198302172007011005	Penata / III c	Sub Koordinator Substansi UED & Permodalan Desa	S1
14.	Kristian Toulasik NIP. 196701151986091001	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola sarana dan prasarana sumber daya alam	SLTA
15.	Marthinus Allo,SH NIP: 196912092007011025	Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga	S1
16.	Oskar Bolla, SE NIP. 197310052010011005	Penata Muda Tk.I / IIIb	Penyusun Bahan Pembinaan institusi Masyarakat perdesaan	S1
17.	Elisa Soeki, SH NIP.19731230200604017	Penata Muda Tk.I / III b	Analisis Pembangunan	S1
18.	Marid F. Mbeo, SH NIP: 197803212007011007	Penata Muda / IIIa	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	S1
19.	Fiktoria M. Kanuk, SH NIP. 197802012012122002	Penata Muda/III a	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	S1
20.	Justen J. Elia A,Md NIP. 19731020 201406 1 002	Penata Muda/III a	Pengelola Data	D3
21.	Wilem W. Sui NIP: 197306042006041002	Penata Muda/III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Perdesaan	SLTA
22.	Adi A. Ndaomanu NIP: 197904012005011017	Penata Muda/III a	Pengelola data keuangan dan Pendapatan Desa	SLTA
23.	Sigrit Ernestus Hadi, SE NIP: 19960214 202201 1 007	Penata Muda/III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SI
24.	Ronald Wilry Mooy, SE NIP: 19960529 202203 1 002	Penata Muda/III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SI

25.	Danial Zacharias NIP. 198110212012121006	Pengatur Muda Tk.I / II c	Bendahara pengeluaran	SLTA
26.	Semuel Tonak NIP. 198306102012121003	Pengatur Muda Tk.I/II c	Pengelola data Keuangan dan Pendapatan desa	SLTA

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula **Rp. 2.609.695.526,-** berkurang sebesar **Rp. 284.518.708,-** atau 9.83 % menjadi **Rp. 2.934.714.234,-** dengan rincian :

Belanja Operasional : Rp. 2.609.695.526,- bertambah 284.518.708,- menjadi Rp. 2.934.714.234,-

Belanja Modal : Rp. 40.500.000,-

1. Belanja Operasional : Rp. 2.889.214.234,-

2. Belanja Modal : Rp. 40.500.000,-

Tabel 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.609.695.526	2.934.714.234	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO	2.137.695.526	2.297.620.234	
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,457,700	91.009.500	
Penyusunan dokumen, perencanaan perangkat daerah	50,000,000	50.000.000	
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	3,019,000	3.019.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.286.124.000	1.827.090.000	(94.349.708)
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.860.400.576	1.954.750.284	94.349.708
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verikasi Keuangan SKPD	45,240,000	45.240.000	
Administrasi Barang Milik Daerah	8,100,000	6.600.000	
Pengamanan Barang Milik daerah	7,200,000	7.200.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.410.950	130.910.950	40.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	4,426.500	4.426.500	-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	40.500.000-	-
Penyediaan bahan logistik kantor	20.068.150	20.068.150	-
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	26.499.300	26.499.300	-
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	39.417.000	39.417.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah daerah	38.425.000	38.425.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	1.625.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	36.800.000	36.800.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	43.000.000	68.075.000	25.075.000
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	43.000.000	68.075.000	25.075.000
PROGRAM PENATAAN DESA	69.000.000	119.000.000	50.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa	69.000.000	119.000.000	50.000.000
Pembentukan, Penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	69.000.000	119.000.000	50.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	130.000.000	130.000.000	
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa			
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	25.000.000	

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	25.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa	30.000.000	30.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	25.000.000	25.000.000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25.000.000	25.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT	273.000.000	388.094.000	115.094.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	273.000.000	388.094.000	115.094.000
Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.500.000	23.500.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.000.000	142.000.000	

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.500.000	7.500.000	
Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	215.094.000	115.094.000
Total	2.609.695.526	2.934.714.234	284.518.708

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

- 3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

TABEL 3.1
Perjanjian kinerja antara Kepala Daerah bersama Bupati Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Masyarakat		1.1	Indeks Desa Membangun	0,65	0,64
2		Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.2	Persentase Desa Maju dan Berkembang	74,50	75,00
			1.3	Realisasi APBDes	100	100
			1.4	Persentase Bumdes berkembang	28,57	23,76

Realisasi Anggaran Program

Tabel 3.2

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 388.094.000	Rp. 368.032.617	94,83
2	Penataan Desa	Rp. 119.000.000	Rp. 97.803.190	82,19
3	Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 130.000.000	Rp. 129.700.000	99,77
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.297.620.234	Rp. 2.251.154.779	97,98
Jumlah		Rp. 2.934.714.234	Rp. 2.846.690.586	97,00

3.2 Realiasi Anggaran

Adapun Alokasi Anggaran, Program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun Anggaran 2024 dengan Rincian sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2024, Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 2.934.714.234**, Realisasi sebesar **Rp. 2.846.690.586 atau 97.00 %** dengan Rincian sebagai berikut :

Belanja Operasional : Rp. 2.696.690.650,- terealisasi Rp. 2.643.377.109 atau 98.02 %

Belanja Modal : Rp. 60.300.000,- dan terealisasi Rp. 51.985.740 atau 86,21 %

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 3.3

No		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.934.714.234	2.846.690.586	97.00
1		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	53.019.000	53.019.000	100.00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100.00
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat daerah, Tersusunnya Dok Renstra, Renja Induk, Profil OPD, RKT, PK, Rencana Aksi, RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan			
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.019.000	3.019.000	100
		Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja Pertriwulan			
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.990.284	1.960.743.814	98.40
	3	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.954.750.284	1.916.803.814	98.06
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verikasi Keuangan SKPD	45.240.000	43.940.000	97.13
		Tersedianya Honor Pengelola APBD			
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada	7.200.000	7.200.000	100.00

		Perangkat Daerah			
	5	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	7.200.000	7.200.000	100.00
		Tersedianya Honor Pengelola Barang Milik daerah SKPD	7.200.000	7.200.000	100.00
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.910.950	130.442.439	99.64
	6	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	4.426.500	4.426.000	99.99
	7	Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	40.500.000-	40.500.000-	100.00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	8	Penyediaan Bahan Logistik kantor	20.068.150	19.933.150	99.33
		Tersedianya alat tulis kantor			
	9	Penyediaan Peralatan barang cetakan dan penggandaan	26.499.300	26.499.300	100.00
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.417.000	39.083.989	99.16
		Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke propinsi dan luar propinsi			
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.425.000	35.774.526	93.10
	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	1.625.000	100.00
		Tesedianya jasa surat menyurat dan pengadaan materai			
	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.800.000	34.149.526	92.80
		Terlaksananya pembayaran rekening telpon dan internet listrik			
6		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.075.000	63.975.000	93.98
	13	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.075.000	63.975.000	93.98
		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan Dinas Opertasional			
II		Program Penataan Desa	119.000.000	97.803.190	82.19
7		Penyelenggaraan Penataan Desa	119.000.000	97.803.190	82.19
		Terselenggarakannya penataan kelembagaan dan institusi desa			
	14	Pembentukan penghapusan dan perubahan status desa	119.000.000	97.803.190	82.19

		Terlaksananya pembentukann desa persiapan			
III		Program Administrasi Pemerintah Desa	130.000.000	129.700.000	99.77
8		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	130.000.000	129.700.000	99.77
	15	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	24.830.000	99.32
		Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RKPDes)			
		Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes)			
	16	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	25.000.000	100.00
		Fasilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)			
	17	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga kerja sama antar desa	30.000.000	29.870.000	99.57
		Terlaksanya Fasilitas Badan Usaha Milik Desa			
	18	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	25.000.000	100.00
	19	Fasilitasi Ev. Perkembngan Desa serta Lomba Desa	25.000.000	25.000.000	100.00
IV		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	388.094.000	368.032.617	94.83
9		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten			
	20	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.500.000	23.500.000	100.00
		Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat desa dan Masyarakat Adat			
	21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.000.000	129.312.800	91.07
		Terlaksanya Lomba dan Pokjnal Posyandu (posyandu)			

	22	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.500.000	7.500.000	100.00
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan			
	23	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	215.094.000	207.719.817	96.57
		Terlaksananya fasilitas pengutan kelembagaan PKK			
		Realisasi	2.934.714.234	2.846.690.586	97.00

3.3 Capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan pemerintah/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintah sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

TABEL 3.4

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/keg		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		II	Program Penataan Desa	100 %	100%	-	
				1	Meningkatnya Penataan desa			-	
				a	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Istitusi Desa	25 desa	22 desa	Tidak lolos verifikasi	Kelengkapan Proposal harus sesuai prosedur
				II I	Program Administrasi Pemerintah Desa	100 %	100 %	-	
				1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa			-	
				a	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	112 desa	112 desa	-	
				b	Fasilitas Pengolahan Keuangan Desa	112 perangkat	112 perangkat	-	
				c	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga kerja sama antar desa	10 bumdes	10 bumdes	-	

				d	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	22 desa	67 desa	-	
				e	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	112 desa	112 desa	-	
				I V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	100 %	100 %	-	
				1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten			-	
				a	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, LPM, dan karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hokum adat	54 desa	54 desa	-	
				b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga	4 posyandu	4 posyandu	-	

					Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
				c	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah	5 klpk	5 klpk	-	
				d	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 klpk	7 klpk	-	
				e	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan	12 bln	12 bln	-	

3.4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024.

Program kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik, namun pada Program Penataan Desa Kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa yang ditargetkan 25 desa namun terealisasi 22 desa dikarenakan 3 (tiga) desa ini tidak lolos dalam verifikasi pengajuan proposal

3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.5
Kebijakan Strategis

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Percepatan Pencegahan dan penanganan stunting terintegritas	Perbup no 19 tahun 2019, perbup 21 tahun 2020, perbup no 235 tahun 2020	Agar Kader posyandu mengerti apa itu stunting, agar kader mengerti dan paham tentang penyebab terjadinya stunting, agar kader memahami cara penanggulangan stunting
3	Dana Desa	190/PMK.07/2023 tentang pengolahan dana desa	Rumah Layak Huni Perbup No 98 Thn 2019 yang bersumber dari DD, Bantuan Langsung Tunai PMK no 94 thn 2023 yang anggarannya bersumber dari DD

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Tabel 3.6
Rekomendasi DPRD Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang di selesaikan
1	AGAR PEMERINTAH LEBIH SERIUS MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP DESA-DESA DALAM HAL PENGELOLAAN DANA DESA YANG MANA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERJADI BANYAK PENYIMPANGAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT	TERHADAP CATATAN REKOMENDASI DPRD, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TELAH MELAKUKAN FASILITAS TERHADAP DESA DESA YANG DI DUGA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	PENINGKATAN KINERJA DINAS PMD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.

BAB IV

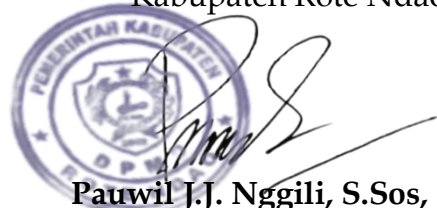
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini di buat sebagai Evaluasi untuk urusan selanjutnya.

Ba'a, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas PMD

Kabupaten Rote Ndao

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Rote Ndao. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018